



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YAMTO SUSENA
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 146171

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 5.040.000.000**

1. Tanah Seluas 420 m2 di BOYOLALI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 840.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 910 m2/200 m2 di BOYOLALI, WARISAN Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/165 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah Seluas 93 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
5. Tanah Seluas 63 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/134 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 870.000.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.



20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.100.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	48.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.965.100.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.965.100.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.